



**TAHUN
2024**

**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**

DINAS SOSIAL

Jalan M.H. Thamrin No. 56, Purwodadi



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL

Jl. MH. Thamrin No.56, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111
Telepon (0292) 422 304, Faksimile (0292) 422 304
Laman dinsos.grobogan.go.id, Pos-el dinsospurwodadi@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2024

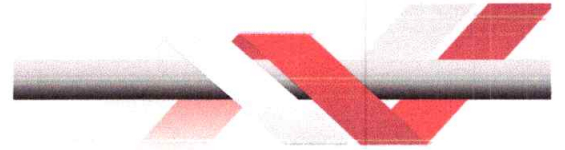
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Purwodadi, Februari 2025
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

Indri Agus Velawati, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV / b)
Nip. 19850817 200902 2 012



KATA PENGANTAR

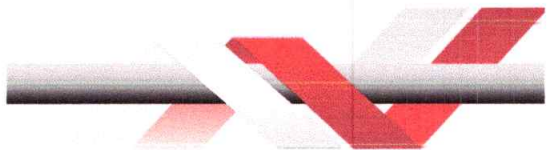
Laporan Kinerja Dinas Sosial merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-04 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial. Kinerja Dinas Sosial diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.





Kabupaten Grobogan, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN



INDRI AGUS VELAWATI, S.E., M.M.

NIP.19850817 200902 2 012

Pembina Tk. I (IV/b)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	8
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	9
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	11
D. Landasan Hukum	11
E. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Strategis	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	22
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Pengukuran Kinerja	35
B. Capaian Kinerja Organisasi	37
1. Perbandingan Target dan realisasi kinerja Tahun 2024	38
2. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya.	39
3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra	41
4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten sekitar	42
5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan	44
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	45



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	47
C. Realisasi Anggaran	54
BAB IV PENUTUP	57
LAMPIRAN	
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
MATRIKS RENSTRA	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	

BAB I

PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimat



sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan. Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
- Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang Sosial
- Pembinaan dan Pengendalian di Bidang Sosial
- Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial
- Pengelolaan Sekretariat dinas

- o Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi





B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026 sebagai berikut :

Masih Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

Masih Tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang harus ditangani.

C. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- 
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
 8. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 24 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan stakeholder.





Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan
Berbudaya”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat



Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Sosial mengacu pada Misi ke-3, yaitu :

**Menguatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata,
berkualitas dan berdaya saing.**

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 4 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kabupaten Grobogan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Penurunan PPKS	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
		1.1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	38	40	45	50	56
		1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah social	Persentase PSKS yang diberdayakan	100	100	100	100	100
		1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	78	80	82	84	86
		1.4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	B B	B B	B B	B B	B B

Sumber : Renstra Dinas Sosial periode 2021-2026





4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2024 adalah sebagai berikut:





Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	TUJUAN: Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.1.	Persentase Penurunan PPKS	%/Tahun	Persentase dihitung dari perbandingan antara jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 dengan jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1	(jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n - jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1) dibagi jumlah PPKS rehabsos dan fakir miskin tahun n-1 kali 100	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
2	SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2.1	Persentase PPKS yang tertangani	%	Persentase dihitung dari perbandingan antara jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan social dengan jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin	jumlah PPKS sasaran rehabsos dan fakir miskin yang tertangani melalui rehabsos dan bantuan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PPKS Rehabsos dan fakir miskin kali 100	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)





3	SASARAN STRATEGIS 2 : Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah social	3.1	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	Persentase dihiutng dari perbandingan antara Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan dengan Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan	Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga yang diberdayakan / Jumlah PSKS Lembaga dan Non Lembaga keseluruhan X 100	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
4	SASARAN STRATEGIS 3 : Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	4.1	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	%	Persentase dihitung dari perbandingan antara jumlah sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dengan jumlah TMPN dan MPN	jumlah sarana prasarana TMPN dan MPN memenuhi standar di seluruh TMPN dan MPN dibagi jumlah TMPN dan MPN dikali 100	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
5	SASARAN STRATEGIS 4 : Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	6.1	Nilai SAKIP OPD	kategori			
		6.2	Nilai IKM OPD	kategori			

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2021-2026

B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Sosial Kabupaten Grobogan

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Persentase Penurunan PPKS	%	1,4
		1.1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang tertangani	%	45
		1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	100



			penanganan masalah social			
		1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	%	82
		1.4	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik didukung dengan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang baik.	Nilai SAKIP OPD Nilai IKM OPD	Kategori	B B

Sumber : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 02 bulan Januari tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
A	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Penurunan PPKS	%	1,4
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	%	45
2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	%	82
4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	Kategori	B B

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial:



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP 2. Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik 3. Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	100%	4.823.410.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	30.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	3.060.246.000





	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	63.022.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	794.610.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	56.177.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	557.355.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	262.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	100%	110.930.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS	100%	110.930.000





		Lembaga dan Non Lembaga		
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	54%	1.006.530.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti yang terlayani 2. Persentase anak terlantar diluar panti yang terlayani. 3. Persentase Lanjut Usia terlantar diluar panti yang terlayani. 4. Persentase gelandangan, pengemis diluar panti yang terlayani.	100%	1.006.530.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	26,56%	173.625.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir miskin yang diberdayakan	13,60%	173.625.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	100%	163.924.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial	100%	103.924.000





		yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			60.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	80%	30.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	80%	30.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 14 bulan 10 tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



Tabel 2.6

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
A	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Penurunan PPKS	%	1,4
1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	%	45
2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	100
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	%	82
4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	Kategori	B B

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase layanan dukungan administrasi	100%	5.065.875.604





		kesekretariatan yang sesuai SOP 2. Persentase Lap Keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik 3. Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang Kinerja perangkat daerah 4. Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas	100%	30.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	100%	2.752.711.604
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu	100%	63.022.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi	100%	964.560.000





		Umum Perangkat Daerah		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu	100%	257.877.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	592.205.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	405.500.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Non Lembaga	100%	110.930.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS Lembaga dan Non Lembaga	100%	110.930.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	54%	1.006.530.000
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	1. Persentase Penyandang Disabilitas terlantar	100%	1.006.530.000





	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	diluar panti yang terlayani 2. Persentase anak terlantar diluar panti yang terlayani. 3. Persentase Lanjut Usia terlantar diluar panti yang terlayani. 4. Persentase gelandangan, pengemis diluar panti yang terlayani.		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir miskin yang diberdayaakan	26,56%	7.644.071.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fakir miskin yang diberdayaakan	13,60%	7.644.071.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS Korban Bencana yang Tertangani	100%	163.924.000
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	103.924.000
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100%	60.000.0000



	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	80%	30.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana makam Pahlawan yang memenuhi standart	80%	30.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2024 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILĪTAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Grobogan.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.





Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negatif), maka digunakan rumus :

$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja, untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, serta faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dimaksud.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:



Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata

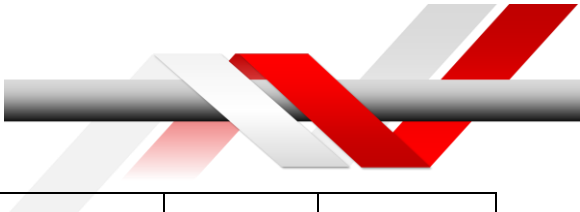


lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Grobogan tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja Tahun 2024

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Tahun 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan PPKS	1,4%	1,4%	100%	Sangat Tinggi	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
1.1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	45%	45%	100%	Sangat tinggi	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	100%	100%	Sangat tinggi	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)



	penanganan masalah sosial						
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	82%	82%	100%	Sangat tinggi	DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)
1.4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	B B	B B	100% 100%	Sangat tinggi	

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, bahwa Tahun 2024 capaian Indikator Kinerja Tujuan 1 capaiannya sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi, dengan capaian indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 100% atau kategori sangat tinggi, capaian kinerja sasaran 1.2 mencapai 100% atau kategori sangat tinggi, capaian kinerja sasaran 1.3 mencapai 100% atau kategori sangat tinggi dan capaian kinerja sasaran 1.4 mencapai 100% atau kategori sangat tinggi. Maka rata-rata capaian sasaran pada Tujuan 1 mencapai 100%, dengan kategori sangat tinggi.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya .

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Penurunan PPKS	1,4%	1,35%	96,21	1,4%	1,25%	89,26	1,4%	1,4%	100
1.1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	40%	36,56%	96,21%	40%	39,62%	99,05%	45%	45%	100
1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	100%	100	100%	100%	100	100%	100%	100
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	78%	78%	100%	80%	80%	100%	82%	82%	100%
1.4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang	Nilai SAKIP Nilai IKM	B B	B B	100% 100%	B B	B B	100% 100%	B B	B B	100% 100%





	bersih dan bermartabat										
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui jika capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya mengalami fluktuatif, yang dibuktikan adanya kenaikan dan penurunan capaian kinerja dari tahun sebelumnya, tahun 2022 1,35% lalu turun menjadi 1,25% di tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 1,4%. Selanjutnya, capaian kinerja sasaran 1.1 dan sasaran 1.3 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sementara capaian sasaran 1.2 dan sasaran 1.4 stabil sesuai target.

3. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6 = \frac{4}{5} \times 100$
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Penurunan PPKS	1,4%	1,4%	100%
1.1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	45%	56%	80,36%
1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial	Persentase PSKS yang	100%	100%	100%



	dalam penanganan masalah social	diberdayakan			
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	82%	86%	95,35%
1.4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	B B	B B	100% 100%

Dari analisis tabel di atas, bahwa tingkat kemajuan capaian kinerja Tahun 2024 pada indikator kinerja Tujuan 1 mencapai 100%, sehingga untuk potensi mencapai target jangka menengah pada tahun 2026 sangat mungkin tercapai, sedangkan untuk tingkat kemajuan indikator kinerja sasaran 1.1 mencapai 80,36%, indikator kinerja sasaran 1.2 100%, indikator kinerja sasaran 1.3 95,35% dan indikator kinerja sasaran 1.4 100%.

4. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Thn. 2024 (%)	Prov. Jawa Tengah (%)	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Penurunan PPKS	1,4	2,37	59,07
2	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	45	-	-
3	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah social	Persentase PSKS yang diberdayakan	100	-	-
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	82	-	-
5	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemeritahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	B B	-	-

*Dari tabel di atas, capain kinerja Tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian provinsi Jawa Tengah, capaian kinerja provinsi Jawa Tengah lebih tinggi dengan



persentase 2,37%, sementara capaian kabupaten Grobogan sebesar 1,4%. Akan tetapi perbedaan capaian terjadi karena target yang ditetapkan oleh Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah berbeda.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan capaian kinerja serta solusi yang telah dilakukan

Sesuai hasil analisis capaian kinerja di atas, faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase Penurunan PPKS	1,4%	1,4%	100	Untuk mendukung tercapainya target kinerja penurunan PPKS dibutuhkan data berkelanjutan yang valid	Melakukan verifikasi data berkelanjutan dan penganggaran untuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan kepada masyarakat
1.1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang tertangani	45%	45%	100	Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder, tentunya pelayanan publik harus diselenggarakan secara menyeluruh dan mencakup seluruh stakeholder	Meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga pada akhir tujuan dari pelaksanaan publik itu dapat tercapai dan memberikan tingkat kepuasan kepada stakeholder yang menerimanya
1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-	Persentase PSKS yang diberdayakan	100%	100%	100%	Tersusunnya kebijakan dan program-program pemerintah yang	Menyusun kebijakan serta program-program yang mampu mendorong



	kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial					mampu meningkatkan partisipasi pemerhati masalah penanganan social Pemerintah, khususnya Dinas Sosial sebagai dinas pelayanan dasar masalah social	partisipasi pemerhati masalah sosial untuk mencegah dan mengatasi masalah social
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	82%	82%	100%	Pemeliharaan taman makam pahlawan yang dilakukan secara berkelanjutan	Menyediakan anggaran untuk pemeliharaan taman makam pahlawan
1.4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat	Nilai SAKIP Nilai IKM	B B	B B	100% 100%	Manajemen administrasi perkantoran yang berkualitas dan bermutu	Menyusun SOP administrasi dan pelayanan bagi aparatur dinas

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		TARGET	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Capaian				
1	Menurunkan jumlah	1,4	1,4	100	14.021.330.604	13.768.900.891	98	2	14.021.330.604	252.429.713	Efisien



	masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)										
1.1	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	45	45	100	8.814.525.000	8.797.942.550	100	0	8.814.525.000	16.582.450	Efisien
1.2	Meningkatnya partisipasi kelompok-kelompok pemerhati masalah sosial dalam penanganan masalah sosial	100	100	100	110.930.000	108.855.000	98	2	110.930.000	2.075.000	Efisien
1.3	Meningkatnya kualitas pengelolaan taman makam pahlawan	82	82	100	30.000.000	29.750.000	99	1	30.000.000	250.000	Efisien
1.4	Menguatkan manajemen administrasi perkantoran pemerintahan yang bersih dan bermartabat	100	100	100	5.065.875.604	4.832.353.341	95	5	5.065.875.604	233.522.263	Efisien

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang /Tidak Menunjang
	Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100	Menunjang



				Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100	Menunjang
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapanny a		100	Menunjang
				Adminitrasi Umum Perangkat Daerah		100	Menunjang
				Penyediaan Komponan Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor		100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan		100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Material		100	Menunjang
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		100	Menunjang



				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Menunjang
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi,Su mber Daya air dan listrik		100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor		100	Menunjang
				Penyediaan Jaya Pelayanan Umum Kantor		100	Menunjang



				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan,B iaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		100	Menunjang
				Pemerliharan/ Rehabiliatsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL		100	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Grobogan		100	Menunjang
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat		100	Menunjang





				Kewenangan Kabupaten/Kot a			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a		100	Menunjang
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,anak terlantar,lanjut usia terlantar,serta gelandangan pengemis di LuarPanti Sosial		100	Menunjang
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar,anak terlantar, Lanjut Usia		100	Menunjang





				Terlantar,serta gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
				Penyediaan Permakanan		100	Menunjang
				Penyediaan Sandang		100	Menunjang
				Penyediaan Alat Bantu		100	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNG AN DAN JAMINAN SOSIAL		100	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a		100	Menunjang
				Pendataan Fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten /Kota		100	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot a		100	Menunjang
				Fasilitas Bantuan Sosial		100	Menunjang





				Kesejahteraan Keluarga			
				PROGRAM PENANGAN BENCANA		100	Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kot a		100	Menunjang
				Penyediaan Makanan		100	Menunjang
				Penyelenggaraa n Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kot a		100	Menunjang
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana		100	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAA N TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional		100	Menunjang





				Kabupaten/Kota			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100	Menunjang

Dari analisis program/kegiatan di atas, bahwa seluruh program menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, seluruh kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.557.282.350	4.453.005.555	97,71
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.611.142.000	2.517.923.008	96,43
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.550.000	37.456.500	97,16
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	934.611.100	933.001.020	99,83



	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	245.000.000	245.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	473.398.000	473.398.000	97,44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.581.250	254.580.039	99,58
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	98.389.800	97.240.300	98,83
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	98.389.800	97.240.300	98,83
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	451.346.100	450.590.300	99,83
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	70.000.000	70.000.000	100
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	381.346.100	380.590.300	99,80
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	11.814.515.800	11.759.176.502	99,53
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	11.814.515.800	11.759.176.502	99,53
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	88.936.950	87.836.950	98,76
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	88.936.950	87.836.950	98,76





	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	65.000.000	64.950.000	99,92
	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	65.000.000	64.950.000	99,92

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Grobogan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 4 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan terdiri dari Menurunkan jumlah masyarakat dengan kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 1,4%
- Sasaran 01 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 45%
- Sasaran 02 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100%
- Sasaran 03 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 82%
- Sasaran 04 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan nilai capaian kinerja BB



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.14.021.330.604,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.13.768.900.891,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 98,20 % dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,8%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Kabupaten Grobogan, Februari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN


INDRIAGUS VELAWATI, S.E., M.M.

NIP.19850817 200902 2 012

Pembina Tk. I (IV/b)





**PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN**